

ANALISIS KESIAPAN SUMBER DAYA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT

Sennahati¹, Muh. Farid², Sudirman Karnay³ Andi Alimuddin Unde⁴
Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Hasanuddin
nana.fikom.ucm@gmail.com , sennahati@usy.ac.id

ABSTRAK

Indonesia telah mengadopsi konsep good governance dalam pengelolaan layanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi, transformasi digital kemudian menjadi suatu keharusan bagi berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan telah mengadopsi berbagai inisiatif E-Government untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan sumber daya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi transformasi digital melalui penerapan e-government. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki kesiapan sumber daya dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ditandai dengan indeks SPBE yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu 3.09 yang secara kategorik masuk dalam kategori baik.

Kata Kunci: *Sumber Daya, Transformasi Digital, E-Government, dan SPBE.*

AN ANALYSIS OF THE READINESS OF THE RESOURCES OF THE SOUTHERN SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT IN FACING DIGITAL TRANSFORMATION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT

Indonesia has adopted the concept of good governance in managing public services. Along with technological developments, digital transformation has become a necessity for various sectors, including government. As one of the provinces in Indonesia, the South Sulawesi provincial government has adopted various E-Government initiatives to improve the quality of public services and government effectiveness. This research aims to analyze the readiness of South Sulawesi provincial government resources in facing digital transformation through the implementation of e-government. This research is a type of qualitative research. Data collection techniques were carried out using interview and observation methods. The data analysis used is qualitative descriptive analysis. The results of the research show that the South Sulawesi provincial government has ready resources to implement an electronic-based government system (SPBE), which is indicated by the SPBE index which has increased quite significantly in 2023, namely 3.09, which is categorically included in the good category.

Keywords: *Resources, Digital Transformation, E-Government, and SPBE*

Korespondensi: Sennahati. Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa Kode Pos 92113. **No. HP,** **WhatsApp:085319118283** *Email:* nana.fikom.ucm@gmail.com , sennahati@usy.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengadopsi konsep Good Governance dalam pengelolaan layanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi, transformasi digital kemudian menjadi suatu keharusan bagi berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Transformasi digital yang salah satu bentuknya adalah penerapan E-Government atau pemerintahan elektronik menjadi salah satu langkah krusial mendukung praktek Good Governance, dengan mempercepat akses publik terhadap layanan pemerintah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi publik seperti yang dikatakan Dwivedi et al (1) Selanjutnya, Juwana (2) Menyatakan bahwa penerapan ekosistem digital akan menimbulkan tantangan pada bagaimana mengubah infrastruktur tradisional tersebut agar dapat menunjang transformasi digital. implementasi e-Government membutuhkan perubahan paradigma dan budaya organisasi yang kuat, yang mungkin menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi dalam menghadapi transformasi digital, seperti yang dinyatakan oleh Bertot et al (3) Maupun dalam mengubah budaya organisasi, karena seperti yang disebutkan oleh West (4) Bahwa budaya organisasi juga berperan dalam menentukan tingkat kompetensi SDM dalam e-Governance. Budaya yang terbuka terhadap inovasi dan penggunaan teknologi akan mendukung pengembangan kompetensi yang diperlukan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan telah mengadopsi berbagai inisiatif E-Government untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan. Namun, untuk menunjang keberhasilan penerapan E-Government kemudian tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai, tetapi juga pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat. Alshibly & Irani (5) menyebutkan bahwa tantangan kesiapan SDM, seperti tingkat kompetensi serta pemahaman memadai para ASN yang bertugas di pemerintahan tentang teknologi informasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola dan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

Dengan demikian, diperlukan penelitian untuk menganalisis berbagai variabel yang terlibat, seperti tingkat keterampilan teknologi, pemahaman konsep E-Government, kesadaran akan pentingnya transformasi digital, serta dukungan dari pihak pemerintah dan lembaga pendidikan untuk dapat memetakan tingkat kesiapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan E-Governance pada pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Gil-Garcia & Pardo (6) Menyatakan bahwa kompetensi sumber daya yang memadai menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi e-Governance. Hal ini mencakup pemahaman teknologi informasi, keterampilan manajerial, serta pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat. Namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain seperti yang disebutkan oleh Moon (7) Terkait keterbatasan

keterampilan teknologi di kalangan ASN yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang penggunaan teknologi dapat menghambat adopsi dan pemanfaatan sistem e-Governance dengan baik, temuan Chun & Mooney (8) Mengenai bagaimana perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibutuhkan untuk menerapkan E-Governance, serta temuan Sutanto (9) terkait tingkat kompetensi sumber daya Indonesia. Maulana et al (10) Dalam penelitiannya selanjutnya mengatakan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan teknologi informasi, namun kesiapan sumber daya dalam menghadapi transformasi digital untuk e-Government masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kesiapan sumber daya di lingkungan pemerintahan Sulawesi Selatan dalam menghadapi transformasi digital, dengan fokus pada penerapan e-Government. Studi kasus ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan sumber daya pemerintah provinsi sulawesi selatan, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesiapan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesiapan sumber daya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkrit bagi pemerintah provinsi, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi era transformasi digital, khususnya dalam konteks implementasi E-Government di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lain-lain secara holistik dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah terkait dengan transformasi digital dan penerapan e-Government.

Populasi penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel akan dipilih secara bertahap, dengan pertimbangan untuk memastikan representasi yang baik dari berbagai level dan unit kerja di dalam organisasi.

Data akan dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk wawancara mendalam, survei, dan analisis dokumen. Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang persepsi dan pengalaman individu terkait dengan transformasi digital dan e-Government. Survei akan digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan secara luas di antara responden. Analisis dokumen akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti kebijakan organisasi, laporan, dan dokumentasi lainnya. Panduan wawancara akan disusun untuk mendukung interaksi yang terstruktur antara peneliti dan responden. Pertanyaan akan dirancang untuk mengeksplorasi persepsi, pengetahuan, dan pengalaman individu terkait dengan transformasi digital dan e-Government. Informan kemudian akan dirancang untuk

mengumpulkan data secara kuantitatif tentang tingkat kesiapan sumber daya dalam menghadapi transformasi digital. Pertanyaan akan mencakup aspek-aspek seperti keterampilan teknologi, pemahaman tentang e-Government, dukungan organisasi, dan persepsi terhadap perubahan. Selanjutnya, sebuah checklist akan disusun untuk membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti kebijakan organisasi, strategi transformasi digital, dan laporan kinerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Penerapan elektronik government di Pemprov Sulsel

Keseriusan Penerapan elektronik government oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut senantiasa dilakukan penyesuaian standar sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. Lebih daripada itu dalam mewujudkan maksimalnya penerapan elektronik government maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuat target capaian mulai tahun 2021 -2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1 Target Nilai Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023

2021	2022	2023
2.80	2.90	3.00

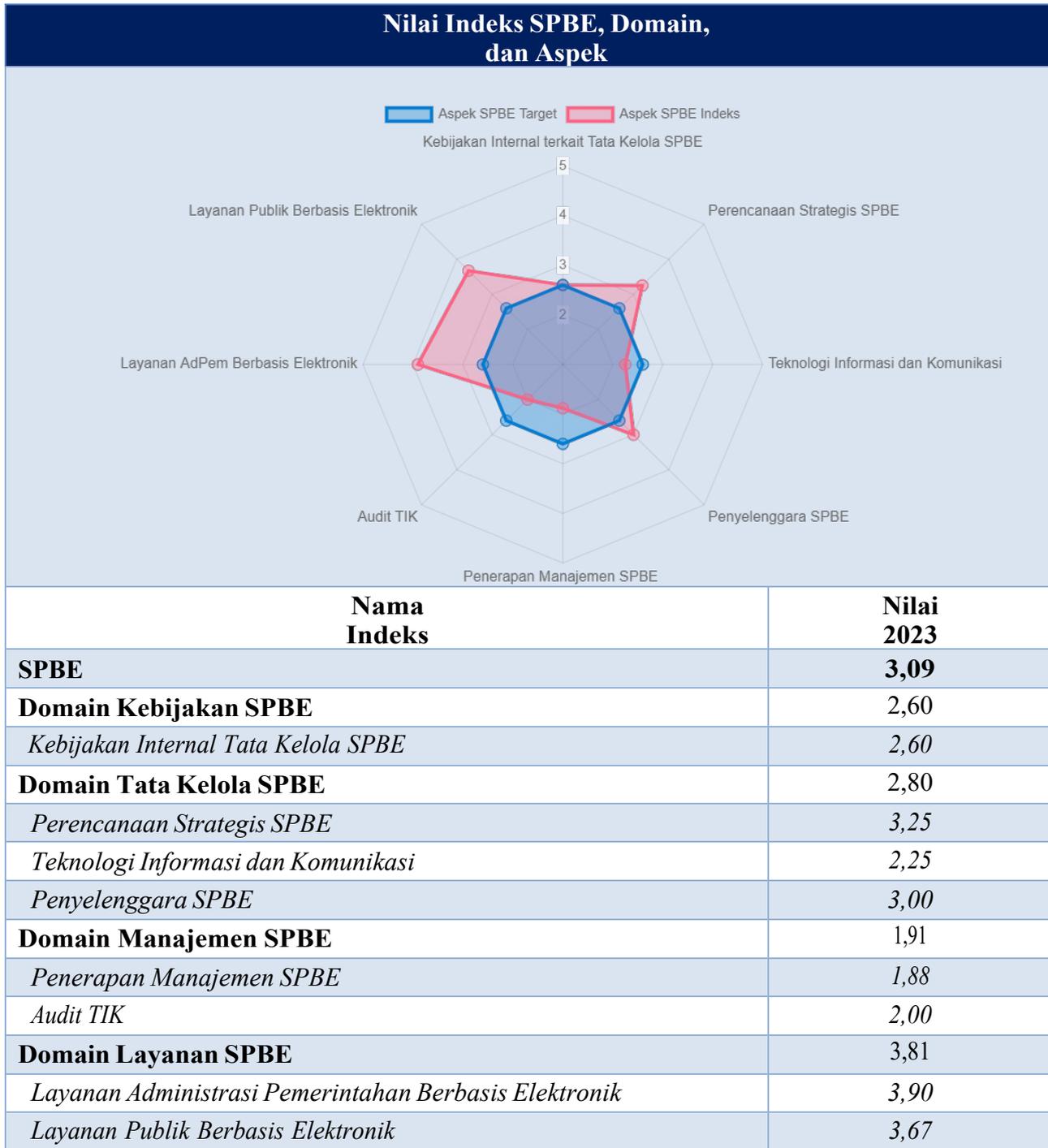
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Penilaian indeks SPBE merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mengintervensi maksimalisasi penerapan SPBE pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Penilaian SPBE mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri dari 4 domain yakni domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan domain layanan SPBE.



Gambar 1: Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Berdasarkan hasil penilaian SPBE pada tahun 2021 untuk Provinsi Sulawesi Selatan berada pada indeks 2.05. Indeks ini menunjukkan hasil dengan predikat “Cukup”. Hasil tersebut adalah akumulasi dari semua domain yang menjadi lokus penilaian SPBE yakni domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan domain layanan SPBE. Penilaian indeks SPBE ini berisikan nilai beberapa aspek dan indikator SPBE, hal ini dimaksudkan meninjau gap ketercapaian dan kondisi ideal yang harus dicapai pada masing-masing domain. Mengacu pada indeks penilaian SPBE tahun 2021 seluruh domain masih dibawah target yang diharapkan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut dibutuhkan pengadaan dokumen kebijakan, pembuatan aplikasi administrasi dan layanan publik yang sesuai dengan perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, pembuatan dokumen arsitektur dan peningkatan infrastruktur SPBE. Seluruh domain SPBE Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi kelemahan dan memang berada di bawah target yang telah ditentukan. Dari data diatas domain kebijakan SPBE berada pada angka 1,30 yang secara kategorik masuk dalam kategori kurang, kemudian domain tata kelola SPBE berada pada angka 1,70 yang secara kategorik masuk dalam kategori kurang, domain manajemen SPBE berada pada angka 1,09 dengan kategori kurang dan domain layanan SPBE yang secara kategorik tergolong baik. Berdasarkan pada data tersebut hanya domain layanan SPBE yang tergolong baik, adapun domain lainnya masuk dalam kategori kurang.

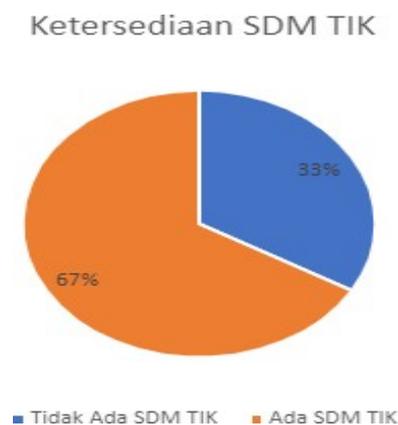


Gambar 2. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Dalam rangka memaksimalkan penerapan SPBE, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan perbaikan dalam tata kelola penerapan SPBE dan hal ini membuahkan hasil dengan meningkatnya indeks SPBE pada tahun 2023 yang melebihi target capaian. Berdasarkan hasil penilaian SPBE pada tahun 2023 untuk Provinsi Sulawesi Selatan berada pada indeks 3,09. Hasil tersebut menunjukkan hasil dengan predikat “baik”. Dari data diatas domain kebijakan SPBE berada pada angka 2,60 yang secara kategorik masuk dalam kategori cukup, kemudian domain tata kelola SPBE berada pada angka 2,80 yang secara kategorik masuk dalam kategori baik, domain manajemen SPBE berada pada angka 1,91

dengan kategori cukup dan domain layanan SPBE berada pada angka 3,81 yang secara kategorik tergolong sangat baik. Berdasarkan pada data tersebut terlihat bahwa penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan indeks 3,09. Adapun domain yang paling tinggi yaitu domain layanan SPBE berada pada angka 3,81 yang secara kategorik tergolong sangat baik dan domain paling rendah yang perlu dievaluasi dengan serius yaitu domain manajemen SPBE berada pada angka 1,91 dengan kategori cukup.

Kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bertransformasi juga dapat dilihat dari kondisi Eksisting SDM TIK pada 45 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi Eksisting SDM TIK merupakan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung operasional penyelenggaraan SPBE. SDM TIK yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) yang tersebar di 36 (tiga puluh enam) OPD. Terdapat 18 (delapan belas) OPD yang tidak memiliki SDM TIK yaitu: Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, UPT RSUD Sayang Rakyat, UPT RSKD Dadi, UPT Pelatihan Kesehatan, UPK Balai Pelatihan Kesehatan, UPK Balai Kulit, Kelamin dan Kosmetika, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa, dan Biro Umum. Data ketersediaan SDM TIK dapat secara persentase sebagaimana pada gambar dibawah 67% yang memiliki SDM TIK dan 33% yang belum memiliki SDM TIK.



Gambar 3. Ketersediaan SDM TIK Pemprov Sulawesi Selatan

Transformasi digital dalam implementasinya salah satunya ditentukan oleh sejauhmana kesiapan sumber daya manusianya terutama dalam hal pemahaman pegawai yang ada pada setiap OPD dalam penggunaan digitalisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdis Diskominfo bapak Sultan Rakib:

“Pegawai yang berada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hampir semua telah memahami penggunaan teknologi dengan baik. Hanya sedikit yang kurang memahami

penggunaan teknologi yakni beberapa pegawai senior yang telah berumur. Dalam rangka memaksimalkan kompetensi pegawai dalam pemahaman penggunaan teknologi senantiasa diadakan bimtek guna memberikan pemahaman kepada para pegawai tersebut”.

II. Analisis kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan elektronik government

Sumber daya merupakan aset yang dimiliki sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Sumber daya adalah alat utama dalam mendukung berjalannya kegiatan operasional organisasi. Salah satu hal menjadi ukuran pada setiap organisasi dalam transformasi digital adalah sumber daya manusianya terutama pada sector Teknologi Informasi dan Komunikasinya. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pada PEMPROV SULSEL yang belum memiliki SDM TIK sebanyak 33% atau 18 PD. OPD yang belum memiliki SDM TIK adalah Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, UPT RSUD Sayang Rakyat, UPT RSKD Dadi, UPT Pelatihan Kesehatan, UPK Balai Pelatihan Kesehatan, UPK Balai Kulit, Kelamin dan Kosmetika, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Pengadaan Barang/Jasa.

Fenomena diatas mengindikasikan bahwa pada beberapa OPD di Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kompetensi dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentu menjadi masalah yang perlu segera dibenahi. Bagaimana tidak, transformasi digital adalah sebuah kondisi dimana organisasi dalam aktivitasnya telah berbasis digital. Jika demikian, dalam upaya mendukung transformasi tersebut ketersediaan sumber daya yang kompeten adalah fondasi dasarnya. Transformasi digital melalui penerapan elektronik government juga merupakan salah satu program strategis nasional yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan diterjemahkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal kesiapan sumber daya guna menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik secara penilaian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat dari indeks SPBE dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yang grafiknya terus meningkat. Pada tahun 2021 indeks SPBE berada pada angka 2,05 yang secara kategorik tergolong cukup. Kemudian pada tahun 2023 indeks SPBE Pemprov Sulsel berada pada angka 3,09 yang secara kategorik tergolong baik. Peningkatan nilai indeks SPBE Pemprov Sulawesi Selatan 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemprov Sulsel sangat serius dalam bertransformasi dan senantiasa berbenah dengan melakukan perbaikan pada beberapa sector.

Yu-che dan James Perry¹⁸ berpendapat bahwa *E-Government* merupakan sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga. Penerapan elektronik government pada Pemprov Sulawesi Selatan juga dapat dilihat dari sejauh mana Pemprov bertransformasi dengan menjalankan sistem kerja berbasis digital. Sistem kerja yang berbasis digital ditandai dengan digunakannya aplikasi ataupun website dalam proses kerja organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, Pemprov Sulsel saat ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengelola 223 website dan aplikasi pada masing-masing OPD yang berada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kesiapan dalam bertransformasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara keorganisasian sudah cukup siap.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki kesiapan sumber daya dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ditandai dengan indeks SPBE yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu 3.09 yang secara kategorik masuk dalam kategori baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Mc AFEE, G. D. (2014). *Leading Digital (Turning Technology Into business Information)*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Alshibly, H. H., & Irani, Z. (2017). Towards effective e-government in developing countries: an exploratory study of the role of motivation, leadership, and technology acceptance in Syria. *Information Technology & People*, 30(4), 793-814.
- Bank, W. (2015, Mei). *World Bank Group*. Retrieved 07 Rabu, 2024, from Elektronik Government: <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>
- Birokrasi, K. P. (2020, Mei 22). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Retrieved Juni 08, 2024, from PANRB: <https://www.menpan.go.id/site/>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2015). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government information quarterly*, 32(1), 30-40.
- Caldow, Janet. (2001). *E-Gov Goes Wireless: From Palm to Shining Palm*, IBM Institute for Electronic Government.
- Chen, Yu-Che, James Perry. 2003. "Outsourcing for E-Government: Managing for Success" dalam *Public Performance & Management Review*. Vol. 26, No.4 (June, 2003).pp.404-421. Published by: ME. Sharpe, Inc.Stable. URL: <http://www.jstor.org/stable/3381115>.
- Chun, S. A., & Mooney, J. (2009). The effects of e-government on trust and confidence in government. *Public Administration Review*, 69(3), 532-545.
- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., ... & Williams, M. D. (2019). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 101994.
- Gil-Garcia, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187-216.

- Juwana, I. (2019). E-Government in Indonesia: Opportunities and Challenges. In *E-Government Implementation and Practice in Developing Countries* (pp. 169-183). IGI Global.
- Kotarba, M. (2018). Digital Transformation Of Business Model. *Foundations of Management*, Vol. 10 (2018), ISSN 2080-7279 DOI: 10.2478/fman-2018-0011, 123-142.
- Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424-433.
- Maulana, I., Mulyani, S., & Rizal, S. (2020). The Effect of E-Government Implementation on Public Service Quality with Good Governance as Mediation Variables (Study at the South Sulawesi Provincial Government). In *Proceedings of the 5th International Seminar on Sustainable Urban Development (ISSUD 2019)* (pp. 155-161). Atlantis Press.
- Nathalie Haug, I. M. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *government information quarterly*, 1-16.
- Sutanto, J. (2016). E-government implementation in Indonesia: A systematic literature review. *Government Information Quarterly*, 33(1), 143-160.
- Vijay Gurbaxani, D. D. (2018). Gearing Up for Successful. *leading digital transformation through research*, 1-21.
- West, D. M. (2004). E-government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15-27.